

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Definisi Bank

Menurut Kasmir (2012:3), dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan” menyatakan bahwa:

“Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa - jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegitannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya”.

Menurut Prof. G. M Verryn Stuart (dalam Abdullah dan Francis, 2013:2) menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran dan tempat uang giral”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk menyalurkan dan memberikan jasa – jasa lainnya tentang kebutuhan kredit dengan dana yang diperoleh dari orang lain

2.1.1.2 Fungsi Bank

Menurut Latumaerissa (2013:135), fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediary yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di bank.

2. *Agent of Development*

Agent of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi disuatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengaman (Safety Box), inkaso (collection), dan lain sebagainya.

1.1.1.3 Jenis – jenis Bank

Menurut Kamir (2014:31) bank dibagi dalam beberapa jenis salah satunya jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi diklompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah

operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

1.1.1.4 Sumber – Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014:58) dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi.

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain. Adapun sumber dana dari masyarakat luar dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Simpanan giro

b. Simpana tabungan

c. Simpanan deposito

3) Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain:

- a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- b. Pinjaman antar bank (call money) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan

1.1.2 Kredit

2.1.2.1 Definisi kredit

Kata kredit sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari - hari, istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar kredit adalah

kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima debit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di janjikan.

Menurut Kasmir (2014:85) definisi kredit adalah :

“kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan menurut Rivai (2007:4) mendefinisikan kredit sebagai :

“kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa kredit adalah suatu pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan dasar kepercayaan yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk dikembalikan kembali dalam waktu yang telah disepakati.

2.1.2.2 Unsur – unsur, Tujuan dan Fungsi kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014:87) :

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang

- kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan. Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antar si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
 3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
 4. Risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
 5. Balas jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Pemberian fasilitas kredit juga mempunyai tujuan-tujuan yang tidak terlepas dari misi bank antara lain (Kasmir, 2014:88) :

1. Mencari keuntungan. Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah.
2. Membantu usaha nasabah. Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu Pemerintah. Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan

pemberian kredit adalah :

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemati devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna sehingga adanya kredit maka uang tersebut menjadi untuk menghasilkan barang atau jasa oleh debitur.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini kredit perbankan dapat meningkatkan uang kartal sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang menjadi berguna dan bermanfaat.
4. Untuk meningkatkan peredaran barang. Kredit juga dapat memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan adanya kredit yang diberikan akan membantu jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam proses ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Kredit yang diberikan bank akan dapat mengatasi kekurangan permodalan dari para debitur terutama pengusaha sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan

usahanya.

7. Meningkatkan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika suatu kredit disalurkan untuk membangun pabrik maka dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal kredit internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara kreditur dan debitur sehingga dapat mendorong adanya kerjasama di bidang lainnya.

2.1.2.3 Jenis – Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2013:9093), kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

- a. Dilihat dari segi kegunaan
 - 1) Kredit investasi
 - 2) Kredit modal kerja
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit produktif
 - 2) Kredit konsumtif
 - 3) Kredit perdagangan
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
 - 1) Kredit jangka pendek
 - 2) Kredit jangka menengah
 - 3) Kredit jangka panjang
- d. Dilihat dari segi jaminan
 - 1) Kredit dengan jaminan
 - 2) Kredit tanpa jaminan
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
 - 3) Kredit pertanian
 - 4) Kredit peternakan
 - 5) Kredit industri
 - 6) Kredit pertambangan
 - 7) Kredit pendidikan
 - 8) Kredit profesi
 - 9) Kredit perumahan

2.1.2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir (2013:100-103), sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas-berkas
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Wawancara 1
- d. On the spot
- e. Wawancara 2
- f. Keputusan kredit
- g. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
- h. Realisasi kredit
- i. Penyaluran/ penarikan dana

2.1.2.5 Manfaat Kredit Bank

Menurut Taswan (2010:310), menyatakan bahwa kredit mempunyai banyak manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Kredit bagi Debitur
Manfaat bagi debitur yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.
2. Manfaat Kredit bagi Bank
Manfaat bagi bank yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.
3. Manfaat Kredit bagi Masyarakat (negara)
Manfaat kredit bagi masyarakat (negara) yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu, bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun

ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

2.1.2.6 Indikator

Indikator Kredit yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Kasmir (2014:95) adalah sebagai berikut:

1. *Character*. merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.
2. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.
3. *Capital*. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitasnya dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
4. *Collateral*. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan

kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Jaminan harus memenuhi syarat-syarat sebagai jaminan Menurut Rochadi Santoso (2012) azas tersebut dikenal dengan Mast Principles, yaitu :

- a. Marketability, adanya pasaran yang cukup luas atas jaminan tersebut sehingga banyak calon pembeli.
 - b. Ascertainability of Value, dimaksudkan agar jaminan yang diberikan mempunyai suatu standard harga tertentu.
 - c. Stability of Value, jaminan yang diberikan hendaknya tidak menurun harganya bahkan kalau mungkin terus meningkat dimasa yang akan datang. Jadi arti stabil tidak merosot harganya.
 - d. Transferability, jaminan yang diberikan harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara yuridis.
5. *Condition*. Bank harus mengetahui perkembangan perekonomian pada saat tersebut yang berpengaruh terhadap dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur serta prospeknya dimasa yang datang. *Condition of Economic*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

Jadi solusi dari pemecahan fenomena pemberian kredit tanpa adanya tambahan agunan / jaminan yang terdapat di bab 1 adalah teori dari Kasmir (2014:95) yang dijelaskan dalam indikator di atas pada poin 4 *colleteral*.

1.1.3 Audit

2.1.3.1 Pengertian Audit

Pengertian auditing menurut Arens dalam Irwadi (2016:61), yang diterjemahkan oleh Gina Gania adalah

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Pengertian audit menurut Mulyadi dalam Irwadi (2016:62) adalah

“Proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan kejadian ekonomi, dengan tujuan menyesuaikan antara pernyataan tersebut dan kriteria yang ditetapkan serta menyampaikan hasil kepada pemakai”.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa auditing adalah sebuah proses sistematis pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang didapatkan untuk menentukan dan melaporkan sesuai data yang telah diperoleh kepada para pengguna.

2.1.3.2 Tujuan

Tujuan dari audit menurut Sukrisno dalam Irwadi (2016:62) adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkandalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam

rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

2.1.3.3 Manfaat Audit

Adapun manfaat lain dalam suatu perusahaan atau instansi melakukan audit atas laporan keuangan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:7-8) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kejujuran
Adalah memberikan dampak positif pada perilaku karyawan, dengan usaha untuk menekan sekecil kesalahan dalam pencatatan transaksi atau aktivitas lain dalam unit organisasi.
2. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan
Rekomendasi yang diberikan auditor akan dapat memperbaiki kekurangan pengendalian internal maupun sistem dalam perusahaan klien, yang akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional.
3. Mendorong efisiensi pasar modal
Laporan keuangan yang wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum akan dapat dipercaya, maka akan dapat menjadi sumber informasi bagi pasar saham yang efisien.

2.1.3.4 Jenis – Jenis Audit

Menurut Rahayu dan Ely dalam Irwadi (2016:62), jenis audit pada umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
Adalah suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, sesuai dengan kriteria- kriteria tertentu.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)
Adalah suatu pemeriksaan yang berupa penentuan apakah pelaksanaan akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, peninjauan upah untuk menentukan kesesuaian peraturan UMR, pemeriksaan surat perjanjian dengan kreditur dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
3. Audit Operasional (*Operational Audit*)
Adalah suatu pemeriksaan audit yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengendalikan operasional perusahaan.

2.1.3.5 Audit Operasional

Menurut Boynton, dkk dalam Irwadi (2016:62) menyatakan bahwa pengertian dari audit operasional yaitu :

“Audit yang sistematis dengan tujuan untuk memulai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana yang digunakan secara ekonomis dan efisien, apakah tujuan kegiatan, program, dan fungsi yang telah direncanakan dapat dicapai dengan baik”.

Audit operasional menurut Siti Kurnia Rahayu dan ElySuhayati (2013:10) mengemukakan :

“Audit Operasional yaitu menekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang mencakup beranekaragam aktivitas yang luas, yang berhubungan dengan performa masa yang akan datang”.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa audit operasional adalah suatu kajian dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memulai dan melaporkan apakah sumberdaya dan dana yang digunakan secara efektif dan efisien seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.3.6 Jenis – Jenis Audit Operasional

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Sukrisno Agoes (2010:825) pada dasarnya audit operasional terbagi menjadi tiga jenis yaitu : audit fungsional, audit organisasi, dan penugasan khusus. Jenis audit operasional itu dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Audit Fungsional (Functional audits)**
Audit fungsional merupakan bagian untuk mengkategorikan aktivitas dari suatu bisnis atau audit fungsional berkaitan dengan fungsi-fungsi organisasi, misalnya berkaitan dengan efisiensi dan

keefektifan pada fungsi penggajian pada divisi atau perusahaan secara keseluruhan.

- b. **Audit Organisasi (Organizational audits)**
Audit Organisasi merupakan audit operasi dari suatu organisasi berkenaan dengan keseluruhan unit organisasi, seperti departemen, cabang atau anak perusahaan dengan menekankan bagaimana fungsi-fungsi efisiensi dan efektivitas berinteraksi.
- c. **Penugasan khusus (Special assignments)**
Penugasan khusus timbul sebagai akibat permintaan manajemen untuk berbagai jenis seperti menentukan penyebab keefektifan sistem teknologi informasi, investigasi kemungkinan kecurangan yang timbul dalam divisi.

2.1.3.7 Kriteria Audit Operasional

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:11-12)

mengemukakan ada beberapa kriteria audit operasional yaitu :

1. Performa historis didasarkan pada hasil aktual dari periode sebelumnya, yaitu untuk menentukan apakah sesuatu telah menjadi baik atau buruk dalam perbandingan.
2. Performa yang dapat diperbandingkan Informasi ini dapat diperoleh dari kelompok perusahaan dan dari badan pemerintah.
3. Diskusi dan persetujuan dari pihak yang terlibat seperti manajemen perusahaan, auditor, perusahaan atau pemakai laporan.

Pekerjaan yang terpenting dari audit operasional adalah melaporkan hasil audit kepada manajemen atau perusahaan untuk diambil tindakan perbaikan terhadap masalah-masalah yang dilaporkan

2.1.3.8 Tujuan

Menurut Tunggal dalam Irwadi (2016:63), ada beberapa tujuan dari audit operasional, adalah sebagai berikut :

1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.

2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.
3. Untuk menyusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.
4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan.
5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen.
6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.

1.1.3.9 Manfaat Audit Operasional

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:96) ada beberapa manfaat audit operasional yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul, penyebabnya dan alternatif solusi
2. perbaikannya.
3. Mengidentifikasi kriteria untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan
4. organisasi.
5. Mengidentifikasi sasaran, tujuan, kebijakan, dan prosedur organisasi yang
6. belum ditentukan.
7. Menemukan peluang untuk menekan pemborosan dan efisiensi biaya.
8. Menemukan peluang untuk meningkatkan pendapatan.
9. Merekomendasikan perbaikan kebijakan, prosedur dan struktur organisasi.
10. Melaksanakan pemeriksaan atas kinerja individu dan unit organisasi.
11. Menelaah ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tujuan organisasi,
12. sasaran, kebijakan dan prosedur.
13. Menguji adanya tindakan-tindakan yang tidak diotorisasi, kecurangan atau
14. ketidaksesuaian lainnya

1.1.3.10 Indikator

Indikator Audit Operasional yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Bealey (2003:71) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Perencanaan dalam audit operasional serupa dengan audit atas laporan keuangan histories seperti audit laporan keuangan, auditor operasional harus mampu menentukan ruang lingkup penugasan dan menyampaikan hal itu ke unit organisasi. Perlu untuk menentukan staf penugasan yang tepat, mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit organisasi, memahami pengendalian intern, serta dapat memutuskan data informasi yang tepat yang akan diaudit.
2. Penghapusan dan Evaluasi Bahan Bukti
Bahan bukti berlaku untuk audit operasional karena pengendalian intern dan prosedur operasi merupakan bagian yang kritis dalam audit operasional, maka dokumentasi, permintaan informasi ke klien dan pengamatan sering digunakan secara ekstensif. Konfirmasi dan ketepatan perhitungan kurang ekstensif digunakan pada sebagian besar audit operasional dibandingkan dengan audit keuangan karena ketepatan bahan merupakan tujuan kebanyakan audit operasional.
3. Pelaporan Serta Tindak Lanjut
Bentuk dan sifat laporan yang dimuat dalam audit operasional tidak memiliki standar seperti halnya laporan hasil audit laporan keuangan yang harus sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan. Namun laporan dari audit operasional mengandung uraian mengenai laporan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan melakukan tindakan apa saja yang diperlukan.
Menurut HR. Daeng Naja, S.H., M.H, M.Kn (2007:59, 62) adalah dalam pelaporan harus memuat secara jelas mengenai fakta, keadaan yang seharusnya tanpa adanya merubah atau memodifikasi, serta dampak terjadinya penyimpangan. Dalam pelaksanaan tindak lanjut perlu dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan melakukan pengecekan kembali dari pelaporan sebelumnya sehingga dapat menindak lanjuti jika perlu apabila terdapat kesulitan atau penyimpangan yang terjadi kemudian mengusulkan solusi.

Jadi solusi dari pemecahan fenomena Belum sepenuhnya mengikuti aturan dalam pelaksanaan audit terkait pengumpulan data yang akan di audit yang terdapat di bab 1 adalah teori dari Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Bealey (2003:71) yang dijelaskan dalam indikator di atas pada poin 3 pelaporan serta tindak lanjut.

1.1.4 Pengendalian Internal

2.1.4.1 Definisi Pengendalian Internal

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian pengendalian internal secara ketat maka diharapkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit.

Menurut Henry (2015:159) definisi pengendalian internal adalah:

“Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/ undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Menurut Anastasia Diana dan lilis setiawati (2011:82) Pengendalian internal itu sendiri adalah:

“Semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah sebuah rencana, metode, prosedur, dan

kebijakan untuk memberi jaminan yang memadai terhadap efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan / kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain. maka dari itu, Pengendalian internal dalam kredit adalah suatu usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif maksudnya kredit itu dapat ditarik kembali dengan bunganya sesuai perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

2.1.4.2 Unsur – Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013:165) menyatakan unsur sistem

pengendalian pengendalian intern sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.1.4.3 Tujuan Pengendalian Internal

Pada dasarnya, faktor efisiensi dan efektifitas organisasi / perusahaan merupakan sasaran diterapkannya pengendalian internal, karena jika pengendalian internal tidak berjalan seperti yang diharapkan, maka kemungkinan besar (hampir dapat dipastikan) akan timbul yang namanya inefisiensi (pemborosan sumber daya) yang pada akhirnya menjadi beban tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan.

Menurut Henry (2015:160) Tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa :

1. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perseorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan.
Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
3. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

Menurut Mulyadi (2013:180) menyatakan tujuan dari pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan pencapaian dalam tiga golongan tujuan sebagai:

1. Keandalan informasi keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi

2.1.4.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013:181) mengidentifikasi keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern yaitu:

1. Kesalahan dalam pertimbangan (*Poor Judgement*)
Seringkali, manajemen dan personil lainnya dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.
2. Gangguan (*Breakdown*)
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil memahami perintah atau membuat kesalahan karena

kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi (*Kollusion*)
Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidak beresan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen (*Management Override*)
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semua.
5. Biaya lawan manfaat (*Cost Versus Benefit*)
Biaya untuk mengoperasikan tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.1.4.5 Indikator

Indikator Pengendalian Internal yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Agoes (2012:100-102) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Lingkungan pengendalian merupakan suatu fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur.
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)
Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menilai resiko yang terjadi dalam tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Suatu proses pengawasan yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu waktu hal ini melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Jadi solusi dari pemecahan fenomena pengawasan pengendalian internal perlu dibenahi yang terdapat di bab 1 adalah teori dari Agoes (2012:100-102) yang dijelaskan dalam indikator di atas pada poin 5 pemantauan.

1.2 Kerangka Pemikiran

Kredit merupakan sebuah kegiatan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari – hari, dalam pelaksanaannya perlunya menerapkan beberapa aturan agar penyaluran kredit berjalan dengan lancar seperti dengan memberlakukan audit operasional guna mengurus segala sesuatu tentang kegiatan operasional dan selalu melakukan pelaporan agar kegiatan dapat terpantau. Selain itu sistem pengendalian internal juga perlu terapkan untuk mengendalikan berbagai kebijakan agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan tujuan sehingga penyaluran kredit macet dapat teratasi.

1.2.1 Pengaruh Audit Operasional Terhadap Analisis Atas Pemberian

Kredit

Sebelum memberikan kredit perlunya memerhatikan apa saja yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit guna kelancaran dalam

pemberian kredit itu sendiri. Audit operasional dapat digunakan dan berguna sekali dalam pemberian kredit karena audit operasional bertugas mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan di audit dan dilihat apa saja yang perlu di perbaiki dan mengusulkan sesuatu guna kelancaran pemberian kredit.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2008 :13) mengenai pemberian kredit terhadap audit operasional adalah sebagai berikut:

“Audit operasional menilai kegiatan pemberian kredit dalam hal efisiensi, efektifitas, dan ekonomi pada kegiatan operasional dibawah pengendalian manajemen dan melaporkannya sesuai keadaan dan diberikan kepada orang yang tepat dari hasil penilaian bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan”.

Menurut S. Munawir (1990:237) pemberian kredit terhadap audit operasional:

“Cara yang umum diterima untuk meneliti keadaan keuangan seorang nasabah, ialah dengan jalan memperoleh neraca, laporan rugi / laba dan keterangan – keterangan lainnya, sebaiknya diusahakan agar diperoleh laporan yang sudah diaudit, karena auditor dapat memberikan pandangan untuk masalah kredit”.

Pernyataan diatas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh Kawang Maeswary (2008), Andhika Permana Sobari (2009), Rizky Wiepryaningrum (2017) dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan audit operasional terhadap analisis atas pemberian kredit.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan audit operasional berpengaruh terhadap analisis atas pemberian kredit.

1.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Analisis Atas Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit perlunya memerhatikan bagian pengendalian internal yang dimana pengendalian internal berfungsi sebagai mengendalikan berbagai kebijakan perusahaan dengan memerhatikan berbagai aspek dan menilai resiko dari berbagai keputusan demi tujuan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Begitu pula dengan kredit agar pemberian kredit dapat terealisasi dengan baik dan dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi.

Menurut Lilis Setiawati (2011:80) mengenai sistem pengendalian internal terhadap analisis atas pemberian kredit adalah sebagai berikut.

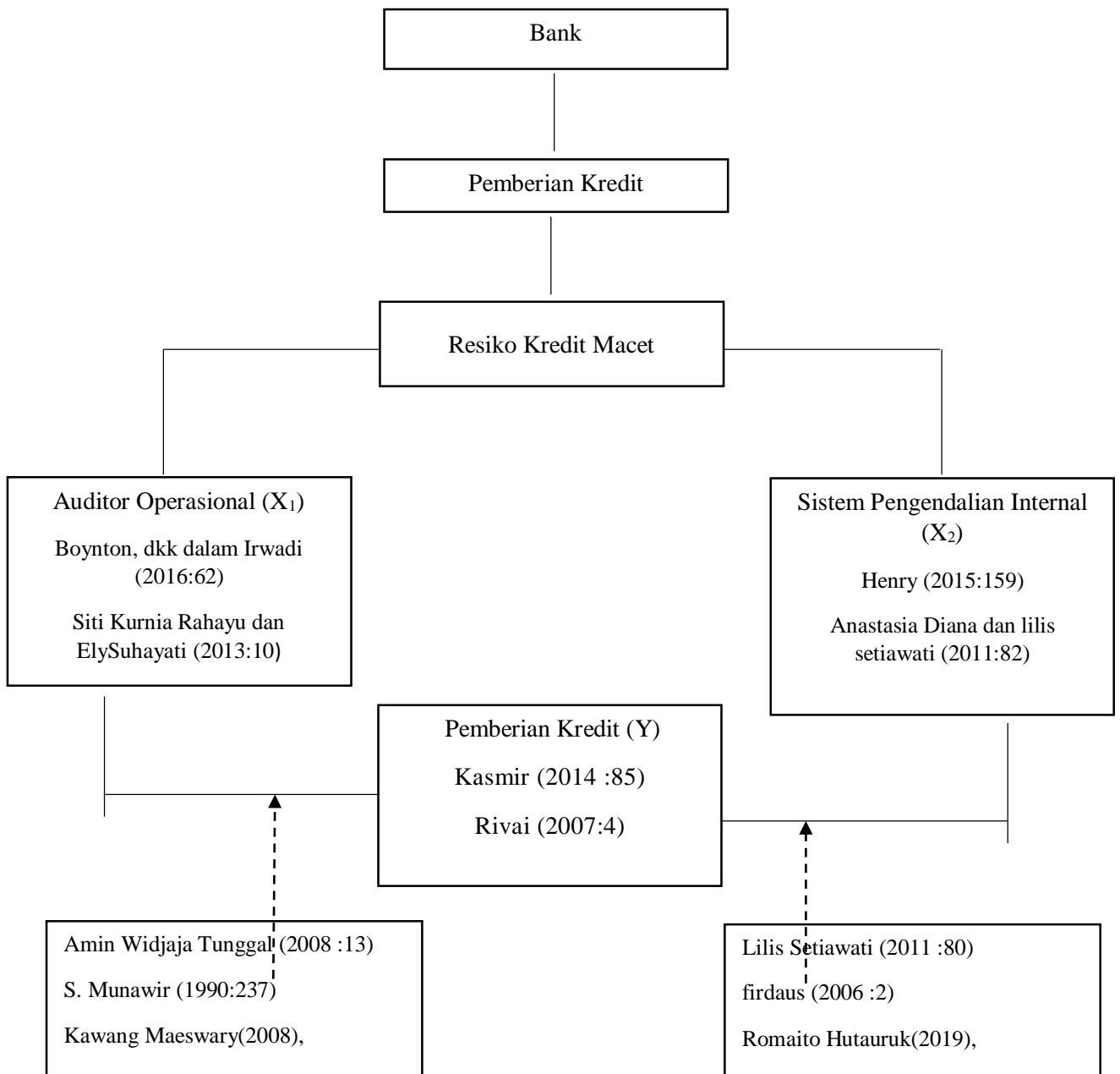
“pengendalian internal penting dilakukan karena perusahaan pasti akan menghadapi banyak ancaman yang bisa mengganggu tercapainya tujuan perusahaan, oleh karena itu diperlukan cara untuk menjaga harta perusahaan, yang salah satunya dengan penerapan sistem pengendalian intern sebelum memberikan kredit kepada nasabah untuk memperkecil resiko kredit”.

Menurut firdaus (2006:2) hubungan sistem pengendalian internal terhadap analisis atas pemberian kredit adalah sebagai berikut

“Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan yang akan terjadi.”

Pernyataan diatas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Romaito Hutaauruk(2019), Sabarita (2010), Nurjannah (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian

internal berpengaruh positif terhadap analisis atas pemberian kredit. Serta menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran yang baik dalam mengelola pengkreditan.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

1.3 Hipotesis

Menurut Sugiono (2017:159), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka dari itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan agar dapat disimpulkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Audit Operasional berpengaruh terhadap Pemberian Kredit.

H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pemberian Kredit.